

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

Mei Indriana Dewi
Mei.dewii2@gmail.com
Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of economic growth (PE), local-Owned Source Revenue (PAD), and General Allocation Fund (DAU) on the allocation of the capital Expenditures (BM) in the Regencies/Cities of East Java Province 2015-2017.

The research was descriptive. While, the data were secondary which taken from the Regional Asset Financial Management Agency (BPKAD) and the central Statistic Agency (BPS), Surabaya with total sample 114 budget realization reports and 38 Regencies/Cities GRDP data Throughout East Java Province. Moreover, the data collection technique used documentation and literature research with quantitative approach. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression.

The research result concluded the independent variable which was referred to economic growth (PE) did not affect the dependent variables which was referred to capital expenditure in East Java Province 2015-2017. The independent variables which were referred to local Revenue (PAD) as well as general allocation fund (DAU) had positive and significant effect on the dependent variable of regency/city which was referred to capital expenditure in east java province 2015-2017.

Keywords: *economy Growth, Local-Owned Source Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure.*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM) pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun periode 2015-2017.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di Surabaya dengan jumlah sampel sebanyak 114 laporan realisasi anggaran dan data PDRB 38 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen pertumbuhan ekonomi (PE) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun periode 2015-2017. variabel independen Pendapatan asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun periode 2015-2017. variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun periode 2015-2017.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal.*

PENDAHULUAN

Semenjak reformasi pada tahun 1998 akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah yang ada di Indonesia merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi atau memperbaiki beberapa hal, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang awalnya diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan keuangan daerah

kemudian pemerintah mengganti kebijakan tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 undang-undang ini berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah, atau disebut sebagai undang-undang otonomi daerah. Seiring adanya perubahan standar akuntansi pemerintahan, pemerintah terus melakukan merevisi kembali peraturan akuntansi pemerintahan hingga diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimana pemerintah diwajibkan menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai standar akuntansi pemerintah yang baru.

secara keseluruhan dan maksud lain dari perubahan peraturan perundang-undangan yang terbaru adalah dikenalkannya kembali bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Selain itu, pengelompokan jenis belanja yang lebih menekankan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah.

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik semakin baik, sebagai pemerataan wilayah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, karena setiap wilayah tidak memiliki kemampuan yang sama dalam bidang keuangan dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya hal ini menimbulkan ketidakmerataan antara daerah satu dengan daerah lainnya, otomi daerah memiliki peran dalam politik yaitu mengembangkan ide, gagasan maupun kreativitas yang meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan peran serta partai dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk mewujudkan demokratisasi untuk daerahnya masing-masing, memujudkan keadilan nasional daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat, pengusaha daerah, investor, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD, dan juga mendorong dalam peningkatan daya saing daerah maka setiap daerah di jawa timur bahkan indonesia terdorong untuk mengembangkan potensi daerahnya agar lebih maju dan lebih baik, namun tetap bhineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu.

Dalam mengatasi kesenjangan fiskal suatu daerah pemerintah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi atau pemusatan. Kemudian diganti dengan otonomi daerah yaitu daerah memiliki hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom mengelolah dan mengatur daerahnya sendiri baik urusan pemerintah maupun urusan masyarakat daerah setempat, dalam pengelolaan otonomi daerah pemerintah daerah harus sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam UU No.23 Tahun 2014, dalam undang-undang tersebut pemberian kewenangan otonomi kepada daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam era otonomi yang terus berkembang pemerintah harus lebih inovatif dan kreatif dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan operasional daerah dalam satu tahun anggaran.

Sebelum pemerintah mewujudkan perannya memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun alokasi dan realisasi pada APBD agar lebih efisien dalam membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur daerah untuk memenuhi prioritas publik. APBD diartikan sebagai daftar terperinci yang memuat informasi-informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu periode atau satu tahun, atau susunan perencanaan pembiayaan program-program suatu organisasi pemerintah daerah dan membuat alternatif pembiayaan lainnya. APBD terdiri dari beberapa bagian yaitu: pendapatan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) dan

dana alokasi umum (DAU), serta pengeluaran yang mencakup belanja pemerintah daerah. APBD merupakan rencana kerja suatu pemerintahan, yang dilaksanakan secara terbuka untuk membangun pelayanan publik berupa sarana prasarana maupun infrastruktur lebih baik untuk kemakmuran masyarakat, dalam pemenuhan pembangunan untuk memberikan kualitas dan kuantitas yang baik maka pemerintah perlu meningkatkan anggaran belanja modal. Belanja modal dibiayai dari dana pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Pembangunan ekonomi merupakan usaha pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kesenjangan sosial. Perekonomian suatu wilayah dikatakan berkembang dan tumbuh apabila produk dan jasa yang dihasilkan pada periode sekarang lebih besar dari periode sebelumnya, dan kemudian diturunkan menjadi nilai tambah (BPS Jawa Timur 2015). Masalah publik yang nyata terjadi yaitu masih banyaknya jalan raya yang rusak dan berlubang, jembatan yang rusak terutama di daerah pelosok desa-desa yang apabila dibiarkan maka pengguna jalan merasakan ketidaknyamanan dan susahya melalui akses jalan yang dilalui hal ini menghambat pengguna jalan untuk melakukan kegiatannya seperti anak yang hendak pergi kesekolah maupun masyarakat lainnya. Masalah lain yang masih kurang memadainya sebuah infrastruktur yang terdapat di puskesmas, terminal, dan pasar tradisional pada desa-desa dan masih banyak masalah lainnya yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan ada indikasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal. Dari penelitian terdahulu menjelaskan hipotesis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, dalam penelitian sebelumnya menjelaskan informasi hasil yang berbeda-beda tetapi sebagian besar dari penelitian-penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Ekonomi Klasik

Dalam sejarah teori ekonomi klasik dicetuskan oleh para ahli ekonomi pada abad 18 hingga awal abad 20. Melalui karya besarnya Adam Smith yang menulis buku *The Wealth Of Nations* yang ditulis di tahun 1776, dianggap sebagai pencetus pengembang aliran ekonomi sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Dalam karya tersebut Adam Smith menjelaskan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri dalam menentukan kegiatan ekonomi, jika tidak ada campur tangan dari pihak manapun, teori ini biasa disebut dengan teori ekonomi klasik. Tokoh-tokoh lain yang mengemukakan pendapatnya tentang teori ekonomi klasik adalah David Richardo, Thomas Robert Malthus, John Struart Mill, Karl Max, Francois Quesnay, David Hume Dan Jean Baptiste Stay.

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu prinsipal (produsen) dan agen (penyalur), dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan dalam melakukan suatu jasa berdasarkan nama prinsipal. (Jensen dan Meckling dalam Windari, 2017). Hubungan antara prinsipal dan agen pada instansi pemerintahan daerah yang bertindak sebagai prinsipal adalah lembaga legislatif (DPRD) yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan mengenai anggaran daerah, sedangkan yang bertindak sebagai prinsipal yaitu masyarakat kabupaten/kota yang berperan dalam melaksanakan

pengawasan. Berdasarkan teori ini hubungan antara atasan dengan bawahan sering bersebrangan karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak (Hasanah dan Suaratana, 2014).

Teori Anggaran

Novalia (2017) Anggaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Anggaran merupakan sebuah perencanaan yang sistematis dalam mengestimasi pengeluaran-pengeluaran daerah untuk kepentingan di masa kini maupun dimasa akan mendatang dengan ini anggaran dikatakan sebuah perencanaan dan pengendalian keuangan untuk organisasi sektor publik.

Anggaran Daerah

Menurut Arif, Bachtiar dkk. (2002:14) anggaran merupakan sebuah instrumen penting di dalam manajemen karena anggaran adalah bagian dari fungsi manajemen. Didalam dunia bisnis, organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat (Negara) anggaran merupakan bagian aktivitas yang penting karena dilakukan secara teratur dalam setiap periode. Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 , anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditelaah dan disepakati bersama dalam pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah.

Belanja Modal dalam Anggaran Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas guna untuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak dan berkualitas dengan mengembangkan jaminan sosial serta mempertimangkan analisis standart belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam (UU No. 23 tahun 2014) untuk memenuhi kewajiban daerah untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal

Tanggung jawab agen (Pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik yang layak dan baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Perekonomian dikatakan bertumbuh atau berkembang didukung oleh pelayanan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai, membuka lapangan pekerjaan untuk mata pencaharian bagi masyarakat guna untuk memperlancar kegiatan perekonomian daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang dimaksud pendaptan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambahan aset atau nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan.

Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

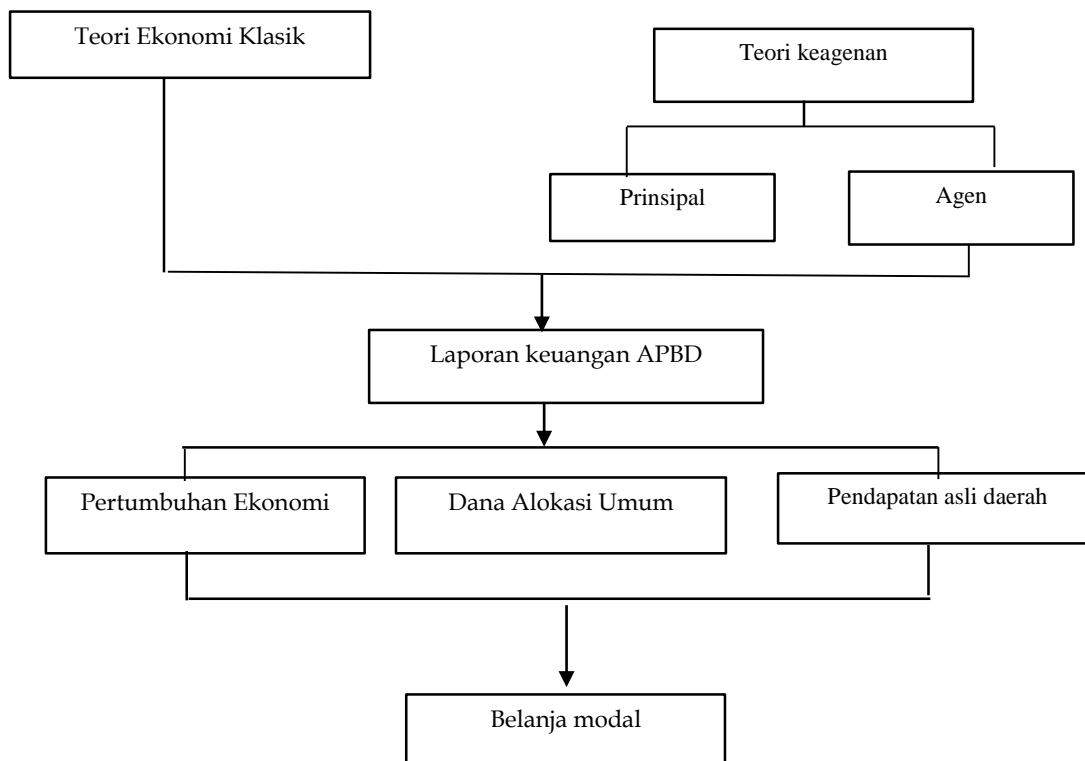
Peningkatan pendapatan daerah diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah daerah, peningkatan pendapatan daerah bisa ditingkatkan dari perbaikan-perbaikan pasar tradisional yang membuka lapangan

pekerjaan bagi masyarakat meningkatkan produktivitas masyarakatnya dengan membuka program-program lapangan pekerjaan yang lain, memperbaiki dan mengembangkan tempat-tempat wisata untuk menarik pengunjung dari luar daerah.

Pengaruh antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah ke pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah agar tidak bergantung pada dana alokasi umum yang telah diberikan dari pemerintah pusat.

Rerangka pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual atau perjanjian antara agen yang bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi, masyarakat yang ada dalam wilayah berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Dimana pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya, yang bekerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya tersebut dengan memberikan pelayanan yang memadai melalui alokasi dari belanja modal (Bastian, 2001). Pada penelitian sebelumnya Aswati (2018) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016 yang menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Jika disesuaikan menurut *Agency Theory*, hubungan kontraktual agen (Pemerintah) dengan prinsipal (masyarakat) dalam konteks Pendapatan Asli daerah (PAD) bisa dilihat melalui kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Menjadikan pendapatan asli daerah menjadi sumber pembiayaan dari belanja modal tanpa bergantung pada pembiayaan dari luar hal ini menunjukkan kemandirian sebuah daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya.

Sebagaimana studi menyatakan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi pendapatan dan sebaliknya pendapatan bisa mempengaruhi dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Untuk kasus di pemda Indonesia, cenderung yang terjadi adalah pendapatan yang mempengaruhi belanja. Hal ini disimpulkan dari kebiasaan di daerah yang menunggu kepastian Dana Alokasi Umum dulu kemudian baru merencanakan alokasi belanja modal dalam APBD (Abdullah, 2007). Berdasarkan uraian di atas hubungan antara pendapatan asli daerah dengan pengalokasian anggaran belanja modal dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₂: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Yang membedakan antara dana alokasi umum dengan pendapatan asli daerah adalah dana alokasi umum dana yang diperoleh berasal dari transfer APBD pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi antara Dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal, jika pendapatan asli daerah diperoleh dari uang masyarakat. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Sumber- sumber pembiayaan dalam rangka penerapan desentralisasi terdiri dari Dana perimbangan pinjaman daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan lain-lain penerimaan yang sah. dan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) yang menunjukkan hasil penelitian Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Maka Berdasarkan uraian di atas hubungan antara pendapatan asli daerah dengan pengalokasian anggaran belanja modal dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₃: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi anggaran pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota untuk tahun 2015-2017 dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2013). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh

atau sensus. Berdasarkan metode sampling jenuh atau sensus, diperoleh sampel sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota dari 38 Kabupaten/Kota anggota populasi dan jumlah observasi sebanyak 114 yang diperoleh dari 38 Kabupaten/Kota dikali 3 tahun periode 2015 – 2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut sugiyono (2013:117) populasi adalah wilayah yang umumnya terdiri dari objek/subjek yang terdapat kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: Laporan realisasi APBD tahun 2015-2017 dan Data Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tahun 2015-2017. Jadi total jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ada 38 kabupaten, data yang diambil selama 3 tahun maka total sampel keseluruhan. yang diambil adalah 114.

Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari badan pengelola keuangan dan aset daerah Surabaya. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dan untuk pertumbuhan ekonomi menggunakan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) data PDRB bisa diakses di situs resmi BPS Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses yang berurutan atau sistematis dari pengumpulan data, pencatatan data, dan penyajian data yang riil untuk tujuan tertentu. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari badan pengelola keuangan dan aset daerah Surabaya (BPKAD). Data yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan khususnya pada Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dalam Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2015-2017. Untuk data pertumbuhan ekonomi yaitu tentang perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari perpustakaan dan bisa diakses pada situs resmi badan pusat statistik (BPS) Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Definisi operasional variabel adalah variabel yang tidak terikat atau tidak tergantung variabel lain dengan cara memberikan operasional dari variabel yang diperlukan untuk mengukur variabel yang diteliti. Variabel bebas (variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel yang lain) yang terdiri atas: (a) pertumbuhan ekonomi (PE), (b) pendapatan asli daerah (PAD) dan (c) dana alokasi umum (DAU). Variabel terikat (variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel bebas) adalah belanja modal (BM).

Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dengan mengelolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada dalam

membentuk sebuah pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu sendiri yang dimana akan mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah tersebut Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per Kapita dengan harga konstan, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt}-\text{PDRBt-1})}{(\text{PDRBt-1})} \times 100\%$$

Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli daerah menurut Halim (2001) merupakan hasil dari penerimaan yang bersumber dari daerahnya sendiri, yang dibebankan kepada masyarakat untuk melakukan iuran terhadap kas daerah dengan menggunakan undang-undang yang berlaku, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah (hpj), restibusi daerah (RD), pendapatan dari laba perusahaan daerah (PLPD) dan lain-lain pendapatan yang sah (LPS). Pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut : PAD : HPD + RD+ PLPD + LPS

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum menurut Halim (2001) merupakan salah satu pembiayaan yang bersumber dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang diatur menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2014 yang dijelaskan dalam bab 1 pada pasal 8 tentang desentralisasi. Dana alokasi umum memberikan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah hasil perhitungan dan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah dana alokasi umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan dalam usulan dewan pertimbangan otonomi daerah. Dana alokasi umum baik untuk daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal)} + \text{Alokasi Dasar}$$

Belanja Modal

Belanja modal menurut Halim (2001) adalah pengeluaran pemerintah daerah sebagai investasi atau untuk pembelanjaan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah untuk melakukan pembelanjaan daerah dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pemerintah dalam memenuhi fasilitas publik. Dalam mengelola belanja modal pemerintah harus memenuhi prinsip efisien, efektifitas, ekonomis, transparan dimana keterbukaan informasi, akuntabilitas yaitu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan perimbangan prioritas pembangunan daerah. belanja modal ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis tentang fakta yang diperoleh dari sampel penelitian ini tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Penyajian statistik deskriptif bermaksud untuk melihat data penelitian yang

berhubungan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas menggunakan dua metode yaitu metode grafik normal p-p plot of regression standardized residu dengan ketentuan ketentuan seperti jika data (titik) mengikuti arah garis diagonal pada grafik maka model regresi dikatakan baik dan memenuhi asumsi uji normalitas. Dan sebaliknya jika data (titik) menyebar tidak mengikuti arah diagonal dalam grafik maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi uji normalitas. Untuk metode yang kedua menggunakan uji one-sample kolmogorov-smirnov test dengan memenuhi ketentuan signifikansi harus lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka model regresi dikatakan distribusi data normal dan sebaliknya jika signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka distribusi data tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2006) Uji multikolinieritas, digunakan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi antara variabel bebas. Ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai VIF lebih besar dari 0,01 dan VIF tidak lebih besar dari nilai 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Jika nilai VIF kurang dari 0,01 atau melebihi nilai 10 maka dikatakan terjadi multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesepadan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji statistik heteroskedastisitas digunakan untuk melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel bebas (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Apabila data (titik) dalam grafik data (titik) tersebut menyebar secara acak dan tidak menggambarkan pola tertentu yang teratur.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara variabel gangguan atau residual, jika dalam model regresi terdapat masalah autokorelasi maka akan menyebabkan varian yang besar dan akan menyebabkan model regresi tidak bersifat BLUE sehingga hasil estimasi dari model regresi tidak dapat dipercaya. Uji autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan DW test (Durbin-Watson test). DW test dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW hitung (d) dengan nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple regression), hal ini sesuai dengan rumusan masalah tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda mengabungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen lainnya dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Model analisis regresi berguna untuk mengestimasi parameter-parameter regresi untuk membantu menjawab hipotesis penelitian. Perhitungan estimasi parameter regresi dan

uji-uji statistik yang digunakan dalam penelitian di dukung dengan program SPSS. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + e$$

keterangan:

bm = Belanja modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

pdrd = Produk domestik regional bruto (PDRB)

pad = Pendapatan asli daerah (PAD)

dau = Dana alokasi umum (DAU)

e = error

Pengujian Hipotesis

Pengujian Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

Dalam uji kelayakan model penelitian ini menggunakan dua cara yaitu dengan uji anova atau uji F dan koefisien determinasi (R^2)

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen) Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum yang dimasukan kedalam model regresi secara bersama-sama apakah berpengaruh terhadap variabel dependen Belanja Modal. Signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Kriteria pengambilan keputusan hipotesis diterima H_a atau hipotesis ditolak H_0 yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika F tabel lebih besar dari F hitung maka hipotesis ditolak.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians pada variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1, jika nilai data semakin mendekati angka satu maka dapat dikatakan memiliki pengaruh variabel independen yang kuat terhadap variabel dependen. Namun, jika mendekati 0 maka menunjukkan pengaruh variabel independen yang lemah terhadap variabel dependen.

Pengujian secara parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan ketentuan-ketentuan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya variabel bebas Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli Daerah, dan Dana Alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak yang artinya variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap variabel terikat Belanja Modal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi objek penelitian

Penelitian ini mengambil objek yang ada di provinsi jawa timur, letak Provinsi Jawa Timur berada di bagian timur Pulau Jawa Indonesia. Menurut administratif provinsi Jawa Timur

terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 Kota, jadi total kabupaten/kecamatan yang ada di Jawa Timur adalah 38.

Struktur organisasi pemerintah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sekretariat daerah beserta 11 biro dan sekretariat DPRD, inspektorat, 1 badan, 20 dinas, 12 lembaga teknis daerah, 4 lembaga lain, dan memiliki 5 rumah sakit daerah. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut:

Tabel 1
Data Populasi Penelitian

BAKORWIL I	BAKORWIL II	BAKORWIL III	BAKORWIL IV
Kota Madiun	Kab. Bojonegoro	Kota Malang	Kota Surabaya
Kab. Madiun	Kab. Tuban	Kab. Malang	Kab. Sidoarjo
Kab. Magetan	Kota Kediri	Kota Batu	Kab. Gresik
Kab. Ponorogo	Kab. Kediri	Kota Pasuruan	Kab. Bangkalan
Kab. N1gawi	Kab. Jombang	Kab. Pasuruan	Kab. Sampang
Kab. Trenggalek	Kab. Lamongan	Kota Probolinggo	Kab. Pamekasan
Kab. Tulungagung	-	Kab. Probolinggo	kab Sumenep
Kota Blitar	-	Kab. Lumajang	-
Kab. Blitar	-	Kab. Jember	-
Kab. Nganjuk	-	Kab. Bondowoso	-
-	-	Kab. Situbondo	-
-	-	Kab. Banyuwangi	-

sumber : jatimprov.go.id

Analisis Statistik Deskriptif

Data khusus tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2017 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	108	.01	.22	.0508	.022
PAD	108	104.233	5.154.149	440.675	72.605
DAU	108	382.373	171.892	941.924	30.925
BM	108	37..226	4.705.234	477.187	51.255
Valid N (listwise)	108				

Sumber : laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data penelitian yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108. pertumbuhan ekonomi (PE) mempunyai nilai minimum 0,01 yang diperoleh Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2015. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (PE) dengan nilai maksimum sebesar 0.22 diperoleh oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2016. Sedangkan nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi (PE) dalam periode 2015-2017 adalah sebesar 0,05 dengan standar deviasi 0,022.

Pendapatan asli daerah pada kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data penelitian yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 108. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai minimum 104 Milyar yang diperoleh Kota Batu pada tahun anggaran 2015. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai maksimum diperoleh oleh Kota Surabaya sebesar 5 Triliun pada tahun anggaran 2017.

Sedangkan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode 2015 – 2017 adalah sebesar 440 Milyar dengan standar deviasi 72.605.

Dana alokasi umum (DAU) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dijelaskan bahwa jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108. Dana alokasi umum (DAU) mempunyai nilai minimum 382 Milyar yang diperoleh Kota Mojokerto pada tahun anggaran 2015. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai maksimum 1,7 Triliun diperoleh oleh Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2016. Sedangkan nilai rata-rata dana alokasi umum (DAU) dalam periode 2015 – 2017 adalah sebesar 941 milyar dengan standar deviasi 30.925.

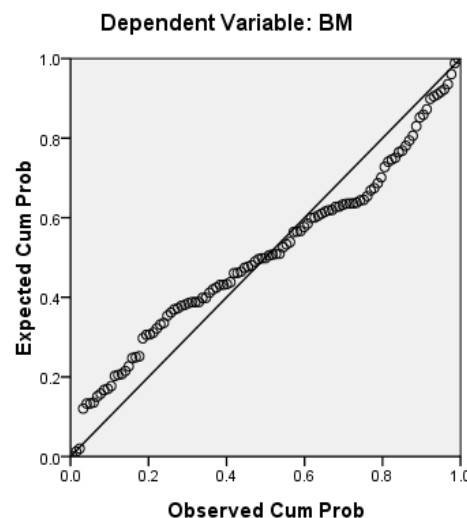
Belanja modal (BM) pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dijelaskan bahwa jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108. Belanja Modal (BM) mempunyai nilai minimum 37 milyar yang diperoleh Kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran 2017. Sedangkan Belanja Modal (BM) dengan nilai maksimum 4,7 Triliun diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun anggaran 2015. Sedangkan nilai rata-rata Belanja Modal (BM) dalam periode 2015 – 2017 adalah sebesar 474 milyar dengan standar deviasi 5.1255.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data residual disimpulkan terdistribusi normal sehingga memenuhi prasyarat untuk uji regresi pada penelitian ini. Uji normalitas juga dapat dideteksi melalui grafik P-P plot dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dengan dasar pengambilan keputusan bahwa hasil data menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal sehingga menunjukkan pola distribusi normal sebagaimana gambar grafik P – P berikut ini :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2
Uji Multikolinieritas
Grafik P – P Hasil Uji Normalitas

Sumber: laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dinyatakan sebagai berikut:

Tab3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity	Statistics
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PERTUMBUHAN EKONOMI	0.952	1.051
	PAD	0.635	1.574
	DAU	0.640	1.563

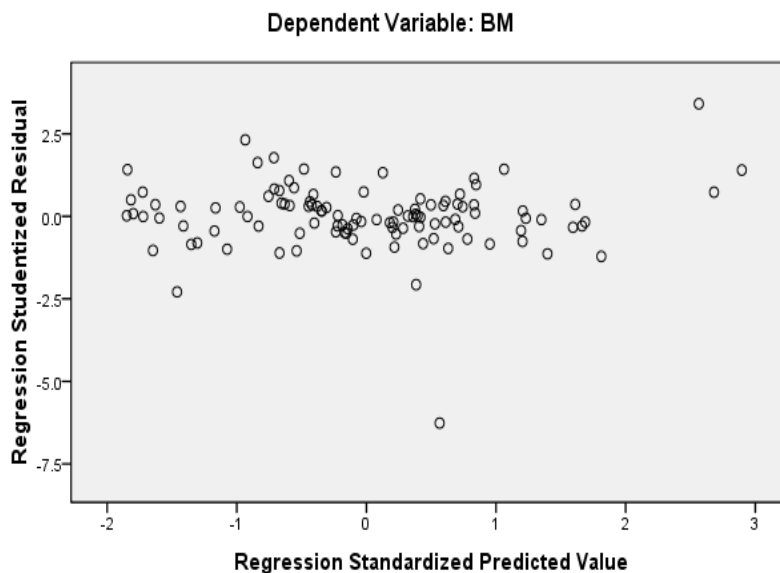
Sumber: laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sama dengan 0.952, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0.635, dan dana alokasi umum (DAU) sebesar 0.640 artinya secara keseluruhan variabel independent memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas data pada penelitian ini. Sedangkan nilai koefisien VIF variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sama dengan 1.051, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1.574, dan dana alokasi umum (DAU) sebesar 1.563 artinya secara keseluruhan variabel independent memiliki nilai VIF kurang dari 10 sehingga mendukung kesimpulan tidak terjadinya multikolinieritas pada pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar grafik scatterplot di atas menunjukkan bahwa keberadaan titik plot menyebar atau tidak terkumpul membentuk pola tertentu dan disimpulkan data variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga mendukung kelayakan model untuk uji regresi pada penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas disampaikan sebagai berikut:

Scatterplot



Gambar 3

Grafik scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara variabel gangguan atau residual dalam model regresi. Pada tabel 4 nilai statistik surbin-waston yang dihasilkan sebesar 1.820. Menurut ketentuan nilai d-w yang dihasilkan terletak diantara -2 sampai pada nilai +2 maka dapat dikatakan bahwa model regresi megindikasikan tidak adanya autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.820

Sumber : laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, pada penelitian ini maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Data khusus tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2017 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients_a

Model		B	Std. Error
1	(Constant)	-0.585	1.535
	PERTUMBUHAN EKONOMI	0.093	0.122
	PAD	0.404	0.069
	DAU	0.630	0.137

Sumber : laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada Tabel di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen sehingga diperoleh hasil persamaan regresi: $BM = -0,585 + 0,093PE + 0,404PAD + 0,630DAU$

Uji Hipotesis (Uji Kelayakan Model)

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R-Square yang diperoleh disajikan pada tabel 6 :

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 _a	.568	.556	.41639

Sumber : laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Berdasar Tabel 9 diperoleh nilai adjusted Rsquare sebesar 0,568 atau 56,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa 56,8% perubahan belanja modal (BM) dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (PE), pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) sedang sisanya 43,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji kelayakan model (Uji F)

Hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F
ANOVA_b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.368	3	8.123	45.651	.000 _a
	Residual	18.504	104	0.178		
	Total	42.872	107			

Sumber : laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Pengujian statistik pada tabel 7 diperoleh hasil uji F dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan diketahui koefisien F adalah 45,651. Hasil perhitungan statistik ini berarti seluruh variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) layak untuk menjelaskan variabel dependen Belanja Modal (BM). Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi ini layak digunakan.

Uji Hipotesis (Uji T)

Jika nilai signifikan < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Belanja Modal. Jika nilai signifikan < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Belanja Modal. Hasil uji T disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Parameter Individual (Uji T)
Coefficients_a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.585	1.535		-0.381	0.704
	PERTUMBUHAN EKONOMI	0.093	0.122	0.05	0.762	0.448
	PAD	0.404	0.069	0.473	5.854	0
	DAU	0.630	0.137	0.369	4.587	0

Sumber : laporan realisasi anggaran dan pdrb, 2015-2017 (diolah)

Dari hasil uji analisis regresi berganda pada Tabel koefisien PE bernilai positif mendapatkan nilai koefisien positif sebesar 0.093 dengan signifikansi 0.448 lebih besar dari 0.05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis pertama (H₁) ditolak karena Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2017. Nilai t hitung variabel PAD sebesar 0.404 dengan signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ dengan demikian hipotesis (H₂) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal terdukung. Nilai t hitung variabel DAU sebesar 0.630 dengan signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha=0,05$, dengan demikian hipotesis (H₃) yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal terdukung.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi disimpulkan tidak berpengaruh terhadap perubahan belanja modal pada laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil dari uji linier berganda koefisien regresi pertumbuhan ekonomi bernilai positif sebesar 0.093 dan signifikansi 0.448 lebih besar dari 0.05 maka menolak H_1 ditolak, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap terhadap belanja modal. Untuk mengetahui Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah atau wilayah tertentu maka menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan pada umumnya menggunakan data PDRB riil perkapita atas dasar harga konstan. PDRB perkapita atas dasar harga konstan mendeskripsikan nilai tambah suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang perkapita atas harga berlaku konstan pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dengan mengabaikan inflasi pada barang dan jasa tersebut. Hasil ini menolak penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita Pada tahun 2011. Yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia Periode 2008-2010). Yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur berdasarkan perubahan laporan kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur secara berturut-turut pada periode 2015 - 2017. Dari hasil uji regresi linier berganda mendapatkan nilai koefisien positif sebesar 0.404 dengan signifikansi 0.000 kurang besar dari 0.05 sehingga disimpulkan Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal (BM). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Dengan demikian dapat diartikan besar kecilnya belanja modal sangat tergantung dari kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah sehingga terpenuhinya rencana dan tujuan pengadaan kebutuhan-kebutuhan daerah melalui rencana belanja modal sehingga dapat diupayakan rencana anggarannya dalam bentuk penyusunan rencana anggaran pendapatan asli daerah beserta sumber-sumber penerimaannya. Dengan kata lain perubahan kemampuan belanja modal suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah dalam hal pembiayaannya dan besaran pendapatan asli daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset-aset daerah sehingga mampu mendorong dan menggerakkan sektor-sektor yang menjadi peluang sumber-sumber penerimaan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pada penelitian ini Dana Alokasi Umum (DAU) yang diukur berdasarkan perubahan laporan realisasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017. Hasil uji regresi linier berganda mendapatkan nilai koefisien positif sebesar 0.630 dengan signifikansi 0.000 kurang besar dari 0.05. Kesimpulan penelitian bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal (BM) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015 - 2017. Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut. Hasil uji regresi menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif

terhadap alokasi belanja modal membuktikan bahwa perubahan alokasi belanja modal daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan daerah, semakin besar alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) akan semakin meningkat pula alokasi dana untuk kebutuhan belanja modal daerah begitu pula sebaliknya. Hasil ini relevan dengan penelitian Permatasari, dan Mildawati (2016), Wahyuningsih dan Widaryanti (2015) dan Pentury (2011) menemukan DAU positif terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal (BM) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015 - 2017. Dikarenakan pertumbuhan tiap tahun yang cenderung konstan akan tetapi belanja modal selalu meningkat tiap tahunnya.

Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal (BM) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015 - 2017. Pendapatan Asli Daerah memberikan peranan sangat penting untuk pengalokasian anggaran belanja modal, suatu daerah semakin tinggi pendapatan asli suatu daerah maka akan mendorong pemerintah daerah untuk membelanjakan modalnya untuk pembangunan, perawatan, pengadaan sarana dan prasarana suatu daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal (BM) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015 - 2017. Semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh suatu daerah membuat belanja modal daerah meningkat hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum mendorong pengalokasian anggaran belanja modal.

Keterbatasan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini yang telah dilakukan ada keterbatasan dari penelitian ini adalah dalam penelitian inihanya menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pengelolah Keuangan dan Aset daerah yang memuat data Realisasi anggaran Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dan data PDRB perkapita dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, data yang diperoleh pada periode 2015-2017. Dalam penelitian ini hanya meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan Dana alokasi umum terhadap belanja modal. Dan masih ada beberapa variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi belanja modal yang tidak ikut diuji dalam penelitian.

Saran

Pertumbuhan Ekonomi (PE) disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal (BM) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015 - 2017 sehingga disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tidak selalu mengevaluasi dan mengapresiasi setiap kemajuan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/ kota melalui kemajuan produk domestik regional bruto (PDRB) per Kapita. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi penambahan tiap taun selalu konstan sedangkan belanja modal setiap tahunnya selalu memiliki kenaikan. Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal (BM) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015 - 2017 sehingga disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor-sektor pelayanan yang menjadi sumber utama penghasilan asli daerah

sehingga semakin meningkatkan realiasi anggaran pendapatan asli daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan pemenuhan alokasi belanja modal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal (BM) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015 - 2017 sehingga disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong masing-masing Kabupaten/Kota agar melakukan survey indikator penyusunan Dana Alokasi Umum lebih realistis dan detail sehingga mampu menyerap lebih besar transfer dana APBN untuk pengimbangan dana APBD dalam memenuhi kebutuhan belanja modal daerah. Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut. Hasil uji regresi menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal membuktikan bahwa perubahan alokasi belanja modal daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan daerah, semakin besar alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) akan semakin meningkat pula alokasi dana untuk kebutuhan belanja modal daerah begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Abdullah. 2007. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Arif, Bachtiar dkk. 2002. "Akuntansi Pemerintahan". Jakarta : Salemba Empat .
- Aswati, 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Boediono. 1994. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2001. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2018. Produk domestik regional bruto kabupaten/kota jawa timur menurut lapangan usaha 2013-2017. <https://jatim.bps.go.id/>. 07 desember 2018 (23:41)
- Dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf>. 07 desember 2018 (23:44)
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi III, Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Gujarati, Damodaran. 2010. Dasar-dasar Ekonometrika. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1). Jakarta.
- Hasanah dan Suaratana, 2014. pengaruh interaksi motivasi dan budaya organisasi pada hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran. jurnal akuntansi universitas udayana, Vol.6 (1) ISSN, Hal. 46-62
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Novalia, Nanda Dwi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota di Provinsi Lampung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956. <http://peraturan.go.id/uu/nomor-32-tahun-1956.html>. 07 desember 2018 (23:41)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah diwajibkan menerapkan Akuntansi berbasis akrual. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>. 07 desember 2018 (23:41)
- Permatasari, dan Mildawati. 2016. "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(1) ISSN : 2460-0585.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Diponegoro *Jurnal Of Accounting*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. <http://peraturan.go.id/uu/nomor-5-tahun-1974.html>. 07 desember 2018 (23:41)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.
- Undang-undang nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan. <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1156.pdf>. 20 november (20:01)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>. 07 desember 2018 (23:41)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Sanusi. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso, E. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya.
- Situngkir. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. *USU Journal of Legal Studies (UJLS)*. Medan.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 1997. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Edisi 2. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Windari. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*. Bandar Lampung
- Wandira. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012). *USU Journal of Legal Studies (UJLS)*. Medan.
- Wahyuningsih, Panca., dan Widaryanti. 2015. Peningkatan PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), hal. 33-48.
- Yovita, 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 - 2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. UNDIP. Semarang.